

angkatan kerja. Mereka sebagian besar berasal dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, dan Nepal.

Namun besarnya pekerja migran yang bekerja di negara ini tidak diimbangi oleh kondisi kerja yang baik. *Amnesti Internasional* dalam laporannya pada tahun 2009 yang berjudul “*Terjebak-Eksploitasi Pekerja Migran di Malaysia*” menyebutkan adanya eksploitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran yang antara lain ditandai dengan lemahnya regulasi perlindungan, tindak represif pasukan RELA, dan pembiaran pelanggaran HAM serta eksploitasi yang dilakukan oleh warganya sendiri.¹

Keberadaan sistem eksploitatif ini tentunya menimbulkan pertanyaan tersendiri terutama jika dikaitkan dengan keberadaan fragmentasi etnis yang ada. Malaysia merupakan negara multi etnis dengan kelompok etnis yang terbesar yaitu Melayu, China, dan India. Meski pemerintah Malaysia selalu mengatakan bahwa negaranya adalah negara yang bersatu, hingga kini antar berbagai kelompok etnis tersebut masih terjadi fragmentasi dan persaingan. Kelompok etnis Melayu merupakan *status quo* pemegang kekuasaan politik. Sementara etnis-etnis lain relatif tidak terakomodasi hak-hak politiknya. Salah satu bentuk nyata keberadaan konflik etnis ini adalah seruan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak saat berpidato pada hari terakhir kongres partai politik Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) pada 1 Desember 2011. Ia

menyerukan bahwa kebangkitan kelompok oposisi di Malaysia merupakan ancaman terhadap pemeluk Islam dan mayoritas etnis Melayu di Malaysia.²

Keberadaan sentimen etnis ini sendiri sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Migrasi etnis China dan India ke negara ini pada era Kolonial Inggris menjadikan terciptanya fragmentasi pada tatanan sosial Malaysia. Sejarah kolonialisme inilah yang menjadi faktor dominan dalam pembentukan bangsa dan negara Malaysia, termasuk sumbangsinya dalam fragmentasi kelompok sosial (etnis) tersebut.

The twentieth century structure of 'race relations' of Peninsular Malaysia is largely a product of social forces engendered by the expansion of British colonialism of the late nineteenth century. (Hirschman, 1986: 331)

Kebijakan *crown colony* yang diterapkan kolonial Inggris berimplikasi pada pengistimewaan etnis Melayu sebagai penduduk asli termasuk pada saat proses perumusan negara dan bangsa Malaysia. Keistimewaan ini membuat kepentingan etnis lain yang ada di negara ini tidak terakomodasi. Fragmentasi kelompok sosial yang dibuat pemerintah kolonial saat era penjajahan berlanjut hingga masa setelah kemerdekaan. Hal ini berujung pada kontestasi identitas yang terus berkelindan pada kehidupan sosial dan politik Malaysia.

Kolonialisme seperti yang terjadi di Malaysia tidaklah berakhir dengan berakhirnya penjajahan. Paska kemerdekaan, hal ini masih menyisakan jejak-jejaknya baik yang tampak maupun tidak.

Bagaimanapun, resistensi psikologis terhadap kolonialisme diawali dengan munculnya kolonialisme. Jadi, gagasan tentang dampak kolonial memiliki makna ganda, yang inklusif baik mengenai peristiwa historis dari pertemuan kolonial maupun peristiwanya.³

Keberadaan dampak kolonial inilah yang membentuk identitas poskolonial Malaysia. Secara praktek, identitas poskolonial ini sendiri memiliki perbedaan dalam ragamnya. Dalam tataran global Edward Said mengenalinya dalam bentuk *orientalisme*, sebuah paham dunia barat untuk mengkonstruksi timur. Di India, identitas ini ditemukan oleh Gayatri Spivak dalam bentuk budaya *subaltern* yang dialami oleh kaum perempuan dan oleh Homi K. Bhaba lewat konsep *mimikri* dan *ambivalensi* nya. Di Malaysia, identitas ini terbentuk dalam wujud fragmentasi dan persaingan antar kelompok sosial (etnis) yang ada di Malaysia. Kehadiran pekerja migran sebagai identitas sosial baru menempatkannya dalam posisi subordinat (*subaltern*) dalam kontestasi persaingan identitas di negara ini.

Juktaposisi dari adanya realita kebijakan pemerintah Malaysia yang cenderung eksploitatif terhadap pekerja migran dan keberadaan identitas poskolonial sebagai basis ide, pondasi yang mengkonstruksi masyarakatnya termasuk pada level elit politik yang berperan dalam pengambilan kebijakan negara yang bias identitas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul "*Konstruksi*

Poskolonialisme dalam Pengambilan Kebijakan Malaysia terhadap Pekerja Migran”.

B. Latar Belakang Masalah

Meskipun oleh Benedict Anderson konsepsi kebangsaan disebut sebagai sesuatu yang terbayangkan (Anderson, 1983: 11), tidak dapat dipungkiri konsepsi ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun identitas nasional suatu negara. Sejak Perjanjian Westphalia menjadikan konsepsi negara-bangsa sebagai entitas baku dalam tatanan hubungan internasional, identitas nasional menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan darinya. Kerancuan identitas nasional suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan dan keberlangsungan negara tersebut kedepan. Beberapa negara seperti Indonesia dan Amerika Serikat telah berhasil menguatkan identitas tersebut dalam bentuk negara-bangsa yang kuat sehingga relatif terjaga dari ancaman disintegrasi. Beberapa negara yang lain terpaksa mengalami disintegrasi karena tidak kunjung menemukan formula yang tepat dalam merumuskan identitas nasionalnya, seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Sementara itu, ada juga negara yang harus hidup dalam pencarian identitas nasional yang tak kunjung selesai, seperti Malaysia.

Pembentukan negara dan bangsa (*state and nation building*) merupakan prosesi awal yang dilakukan oleh negeri yang baru merdeka.

Terbentuknya negara bangsa yang stabil dan mapan merupakan prasyarat

wajib yang akan menentukan masa depan negeri tersebut. Namun keberadaan jejak kultural kolonial yang juga ikut berperan dalam proses pembentukan negara dan bangsa membuat formula yang harusnya merupakan konsensus yang mewakili seluruh pemangku kepentingan yang ada tidak terjadi. Hal ini berimplikasi pada identitas negara tersebut ketika telah merdeka.

Permasalahan identitas menjadi permasalahan yang selalu melekat di negara bekas jajahan. Identitas yang telah mapan pada entitas politik sebelum pemerintah kolonial datang, dipaksakan diubah dengan sistem administrasi baru yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Suatu wilayah jajahan yang pada awalnya telah berdiri suatu atau beberapa entitas politik baik berupa kerajaan, *chiefdom*, ataupun *pristine state*, dipaksakan dimasukkan dalam satu tatanan administratif baru di bawah pemerintahan negara kolonial. Hal inilah yang kemudian menjadikan kuasa politik negara penjajalah yang memainkan peranan penting dalam proses kelahiran negara jajahan tersebut ketika kelak mereka merdeka. Relasi yang terbentuk adalah hubungan dominasi-subordinasi, sehingga formulasi apapun mengenai negara jajahan adalah domain negara kolonial, termasuk dalam hal identitas.

Malaysia merupakan salah satu contoh korban dari dramaturgi kekuasaan kolonial ini. Sebagai negara bekas jajahan, negara ini harus dihadapkan dengan konflik identitas yang terus berkelindan dalam kehidupan masyarakatnya. Formula politik kolonial Inggris selama

penjajahan dan proses kemerdekaan tidak manjur untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara-bangsa yang stabil. Fragmentasi identitas etnis yang begitu kuat dalam stratifikasi sosial menjadikan kohesi kebangsaan Malaysia menjadi sesuatu yang sulit. Oposisi biner identitas *aku* dan *yang lain* sangat kuat melekat dalam kehidupan kelompok-kelompok sosial yang ada.

Dalam sistem politik kolonial, relasi dominasi-subordinasi menjadi relasi yang terjadi dari era kolonial klasik hingga modern. Pada era klasik, hal ini terjadi dalam praktek kolonial kekaisaran-kekaisaran besar seperti kekaisaran Romawi yang terbentang dari Armenia sampai laut Atlantik, kekaisaran Mongol yang mencakup Timur Tengah hingga wilayah China, Kerajaan Inca yang menguasai suku-suku di Benua Amerika, dan kekaisaran China yang kebesarannya melebihi kekaisaran manapun di Eropa. Sistem penguasaan ini umumnya ditandai dengan kewajiban daerah koloni membayar pajak atau upeti kepada kerajaan pusat.⁴ Praktek-praktek inilah yang telah melahirkan kehidupan rasisme, budaya subaltern, hibriditas, dan kreolisasi di negara jajahan. Praktek dominasi ini sendiri tidak hanya terjadi secara represi fisik melainkan juga represi terhadap gagasan dan kesadaran. Kolonialisme dalam sejarah modern yang didominasi kekuatan imperial Eropa memperlihatkan kondisi ini. Rakyat di daerah jajahan selalu menjadi subjek dari segala pandangan dan gagasan Eropa yang di kemudian hari dikenal dengan *orientalisme*.

⁴ Gading Sianipar, *Mendefinisikan Poskolonialisme: Pengantar menuju Wacana Pemikiran Pascakolonialisme*, dalam Mudji Sutrisno & Hendar Putranto (eds), *Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2004, hal: 9

Kekuatan imperial Eropa ini sendiri dimulai dengan kebangkitan kembali atau *renaissance* yang dibarengi dengan pasar yang membutuhkan pasokan komoditi yang berharga lebih murah. Hal ini menyebabkan negara-negara di kawasan tersebut mulai mengirimkan ekspedisi dagang dan militer ke negeri timur yang kemudian dijadikan sebagai tanah jajahan. Praktek ini mengalami puncaknya pada tahun 1815 sampai 1914, dimana daerah jajahan Eropa meluas dari yang awalnya berkisar 35% permukaan bumi menjadi lebih dari 85%.⁵

Posisi subordinat menjadikan negeri jajahan tidak bisa menolak pemposisian sebagai subyek eksploitasi negara penjajah (baca: Eropa). Keunggulan posisional Barat membuat mereka memiliki keleluasaan dalam memperlakukan dan berpikir tentang Timur sekehendak mereka. Hal ini berimplikasi dalam berbagai aspek di tanah jajahan yang berlanjut hingga era kolonialisme itu berakhir (baca: paska kolonial), seperti terlihat dalam aspek budaya berupa hegemoni budaya putih global, dalam aspek sistem politik berupa demokrasi liberal, dalam aspek ekonomi berupa ekonomi neoliberal, dan dalam aspek pengetahuan berupa dominasi epistemologi positifisme. Kondisi ini menjadikan agensi masyarakat di wilayah jajahan terdistorsi dengan kehadiran praktek kolonial.

Sebagai salah satu negara bekas jajahan Inggris, Malaysia tidak lepas dari hal ini. Berbeda dengan sebagian besar negara jajahan yang merdeka dengan sebuah revolusi kemerdekaan, kemerdekaan Malaysia

⁵ Harry Magdoff, *Colonialism (1763-1970)*, dalam *Encyclopedia Britanica*, 15th ed. (1974) hal: 893-894, dalam Said, Edward W., *Orientalisme (terjil)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal: 60

yang diperoleh dengan kompromi politik antara pemerintah kolonial dan elit lokal membuat formula tatanan Malaysia paska kolonial bukanlah murni hasil konsesus antara berbagai kelompok kepentingan yang ada di Malaysia. Hal ini menjadikan terjadinya ketimpangan dalam akomodasi kepentingan tiap-tiap kelompok.

Kolonialisme Inggris dalam sejarah Malaysia modern dimulai pada tahun 1789 dengan merampas Pinang dari Kerajaan Kedah hingga akhirnya menguasai seluruh Melayu dengan sistem residen (*indirect rule*). Dalam sistem tersebut kedudukan raja dan sultan dikekalkan tetapi mereka tidak diberikan kekuasaan.⁶ Pelaksanaan sistem ini oleh Inggris terkait dengan wilayah jajahannya yang luas sehingga pengelolaan wilayah kolonial harus dilakukan dengan strategi politik yang tepat, yang lebih kompromistis kepada Raja atau Sultan yang ada di Malaysia. Terlebih sejak munculnya perlawanan dan adanya persidangan raja-raja Melayu yang pertama kali diadakan pada tahun 1897, pemerintahan kolonial Inggris berusaha mewedahi kepemimpinan politik lokal tersebut.⁷ Tindakan ini selanjutnya disebut dengan *Crown Colony* (koloni mahkota).⁸

Pada era kolonial ini terjadi migrasi besar-besaran etnis China dan India ke Malaysia yang berujung pada fragmentasi pada tatanan sosialnya. Para imigran ini datang karena tertarik dengan tawaran penghidupan,

⁶500 tahun Melayu menghadapi Cabaran (diakses pada 22 Oktober 2011); diunduh dari http://books.google.co.id/books?id=orKI21Wi7aIC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=penjajahan+sistem+residen&source=bl&ots=1gt0vQwfJP&sig=r1UywrHzNg_YI2p700AzYSovcD4&hl=id&ei=WWhoTZXjNoazrAfVq_nCCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDEQ6AEwAw#v=onepage&q=penjajahan%20sistem%20residen&f=false

⁷ibid

⁸Zhoridatul Anissa, *Malaysia Melayu: Asia Tenggara* Garasi, 2009, hal: 22

pekerjaan, serta potensi ekonomi yang menjanjikan. Mereka menempati area komersial dan perkebunan sementara penduduk lokal tetap menempati area rural.⁹ Di kemudian hari, imigran dari China dan India menjadi kelompok migran yang cukup besar. Kemampuan mengelola ekonomi menjadikan etnis China dan India kemudian menjadi kekuatan ekonomi baru meninggalkan penduduk lokal. Ketimpangan mulai terjadi dan menimbulkan masalah sosial yang mencapai puncaknya pada kerusuhan tahun 1969.

Hak-hak istimewa yang diperoleh etnis Melayu pada era kolonial Inggris berlanjut pasca kemerdekaan dan tercantum dalam konstitusi Malaysia. Hak Istimewa (*privileges*) terhadap etnis Melayu ini antara lain: dijaga adat istiadatnya, diberikan prioritas untuk menjadi pegawai negeri, mendapatkan beasiswa, keistimewaan dalam pelajaran, diberikan izin khusus untuk berusaha/ perniagaan, serta hak-hak istimewa lainnya. Namun meski telah diberi keistimewaan, konstitusi ini sendiri pada era selanjutnya ternyata juga tidak menjamin etnis Melayu mendapatkan distribusi pendapatan yang lebih baik karena hanya mendapatkan porsi 2,4% dari total perekonomian. Etnis Melayu dengan identitas Islam tradisional kebanyakan berada di pedesaan serta bekerja sebagai petani dan nelayan. Sementara sektor ekonomi yang lebih menjanjikan seperti industri dan jasa dikuasai oleh etnis China, India, dan asing lain.

⁹*Federalism, Constitutionalism, and Democratic Society in Multicultural Societies: A Case Study of Malaysia* (diakses pada 22 Oktober 2011); diunduh dari

Ketimpangan ini kemudian berlanjut dan berpuncak pada kerusuhan 13 Mei 1969. Peristiwa inilah yang menjadi landasan pemerintah untuk mengambil kebijakan ekonomi baru (*New Economic Policy*). Pemerintah kemudian membentuk *National Operations Council* (NOC) yang diketuai oleh Tun Abdul Razak yang dengan target awal mengubah rasio kepemilikan ekonomi dari 2,4: 33: 63 (bumiputera: orang Malaysia lain: orang luar negeri) menjadi 30: 40: 30 dan didasari pada teori kue mengembang (*expanding pie theory*) yang secara tegas dicantumkan dalam *Second Malaysia Plan*.

Meskipun NEP direncanakan berakhir pada 1990, namun kebijakan ini tetap menjadi landasan utama kebijakan pemerintah yang didukung oleh kuatnya otoritas partai UMNO dalam sistem politik Malaysia. Dominasi etnis Melayu asli yang terlembagakan baik secara sosial maupun politik menciptakan superioritas identitas dan menjadikan identitas lain seperti etnis China, etnis India, dan kaum pekerja pendatang pada posisi subordinat. Etnis China dan India cukup beruntung karena subordinasi tidak terlalu mempengaruhi kekuasaan dalam sektor ekonomi. Namun pekerja migran yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah menjadikan mereka tetap dalam kondisi subordinat.

Konsepsi pekerja migran ini sendiri menurut *International Organization for Migration (IOM)*, sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang baku. Namun secara umum disepakati bahwa pekerja

untuk mencari pekerjaan di negara lain.¹⁰ Sedangkan menurut *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families* tahun 1990, pekerja migran dibedakan menjadi *migrant worker* (orang yang bekerja di negara lain), *regular migrant worker* (orang yang bekerja di negara lain dan memiliki dokumen yang memberikan kewenangan terhadapnya untuk tinggal dan bekerja), dan *irregular migrant worker* (orang yang bekerja di negara lain dan tidak memiliki dokumen).¹¹ Selain itu ada pula konsepsi *global migrant*, *liberal migrant*, dan *transnational migrant*. *Global migrant* adalah konsepsi yang digunakan untuk menggambarkan migran yang mencapai posisi puncak baik itu dalam perusahaan transnasional atau institusi finansial internasional, *liberal migrant* adalah pekerja jasa yang bekerja di bawah perjanjian perdagangan bebas internasional maupun regional, sedangkan *transnational migrant* adalah orang yang berpindah atau secara fisik melintasi batas antar negara baik memiliki dokumen maupun tidak.¹²

Skripsi ini untuk selanjutnya menggunakan pengertian pekerja migran baik *regular migrant worker* maupun *irregular migrant worker*, serta *transnational migrant worker* terutama yang bekerja di sektor informal (*domestic worker*, konstruksi, manufaktur, jasa, pertanian, dan perkebunan) di Malaysia yang rentan mengalami praktek eksploitasi baik dari pengguna jasa maupun kebijakan pemerintah. Pekerja informal inilah

¹⁰ *Labour Migration* (diakses pada 10 Agustus 2012); diunduh dari <http://www.iom.int/jahia/Jahia/developing-migration-policy/migration-labour/labour>

¹¹ Lee, Tang Lay, *Statelessness, Human Rights And Gender: Irregular Migrant Workers From Burma In Thailand* Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005, hal: 5

yang menempati posisi terbawah dalam hierarki ekonomi migran. Mereka sering didefinisikan sebagai *low skilled, unskilled*, dan bekerja di sektor pekerjaan 3 D (*dirty, difficult, and dangerous*) yang dihindari penduduk dan warga lokal (Santos, 2005: 2). Kategori *global migrant* dan *liberal migrant* tidak digunakan dalam skripsi ini dengan asumsi mereka memiliki posisi tawar baik itu dalam sektor ekonomi, akses, pendidikan, maupun politik yang jauh lebih baik sehingga juga lebih resisten terhadap eksploitasi.

Kembali ke praktek eksploitasi pekerja migran di Malaysia, hal ini tergambar dengan jelas dalam laporan *Amnesty Internasional* yang memperlihatkan kondisi memprihatinkan yang dialami para pekerja migran, serta kebijakan pemerintah Malaysia yang tidak memihak pada mereka, terutama pada sistem kerja para pekerja di sektor informal dan sektor prihat. Para pekerja migran sering dipaksa untuk bekerja melebihi jam kerja, kondisi lingkungan kerja yang berbahaya, gaji yang tidak dibayar, paspor yang disita, dan mendapatkan perlakuan kasar dari pihak kepolisian Malaysia.¹³ *Fair Labour Association* menyebutkan hal yang serupa. Lembaga ini menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia tidak memiliki inisiatif dan tindakan yang komprehensif dalam mengatur

¹³*Traped: The Exploitation of migrant Workers in Malaysia* (diakses pada 22 Oktober 2011); diunduh dari: <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA28/006/2010/en/75a63a2e-1a6f-4c14-9667-d2b4de47aef2/asa280062010en.pdf>

permasalahan tenaga migran mulai dari rekrutmen, admisi, penempatan, pengawasan, perlindungan, hingga pemulangan para pekerja migran.¹⁴

Meskipun pemerintah Malaysia telah menandatangani konvensi internasional mengenai HAM seperti CEDAW dan SRC, menandatangani deklarasi ASEAN mengenai perlindungan dan promosi hak pekerja migran, serta meratifikasi delapan inti konvensi ILO, namun implementasinya dalam peraturan dan hukum lokal tidak berjalan. Bahkan undang-undang serta peraturan yang dibuat tidak mencerminkan kepentingan perlindungan terhadap pekerja migran. Undang-undang mengenai tenaga kerja yang ada tidak secara spesifik melindungi para pekerja migran. Urusan pekerja migran sendiri ditangani oleh kementerian dalam negeri untuk urusan izin kerja dan kementerian tenaga kerja untuk urusan peraturan kerja.¹⁵

Sampai disini, tindakan dan kebijakan pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran sekilas hanya karena persoalan imigrasi dan kriminalitas. Namun jika kita kaji lebih dalam terutama mengenai segregasi sosial dan fragmentasi identitas etnis masyarakat Malaysia, sistem politik etnis, dan jejak kolonialisme yang ada, permasalahan ini bukanlah tentang hukum dan ekonomi semata namun juga tentang persaingan etnis, dimana etnis Melayu berupaya untuk mengamankan

¹⁴FLA Occasional Paper: *Migrant Workers in Malaysia* (diakses pada 22 Oktober 2011); diunduh

(baca: sekuritisasi) identitas mereka dan melihat identitas lain sebagai ancaman.

Fragmentasi dan persaingan identitas etnis yang menjadi identitas poskolonial Malaysia berperan sebagai basis ide masyarakat termasuk elit politik. Identitas ini diperkuat dengan sikap etnis Melayu yang menganggap diri sebagai penduduk asli, memperlakukan kelompok lain termasuk pekerja migran sebagai ancaman. Aktor-aktor terutama pimpinan partai UMNO berperan sebagai *secutirizing actor* yang menjadikan kelompok lain termasuk pekerja migran sebagai *existential threat*. Penelitian ini akan fokus pada kelompok pekerja migran sebagai salah satu *existential threat* sehingga pemerintah Malaysia mendiskriminasi mereka dengan berbagai kebijakan yang cenderung eksploitatif.

C. Rumusan Masalah

Elaborasi dari latar belakang diatas memunculkan sebuah pokok permasalahan yakni: *Mengapa pemerintah Malaysia bersikap dan mengambil kebijakan yang cenderung eksploitatif terhadap para pekerja migran?*

D. Kerangka Pemikiran

Bagian ini akan membahas mengenai konsep dan teori yang akan digunakan untuk menganalisa tema yang diangkat dalam penelitian skripsi

1. Konsep Poskolonialisme

Poskolonialisme memberikan gambaran persoalan-persoalan yang belum selesai di negeri yang pernah dijajah. Kajian ini mulai mendapatkan perhatian serius setelah Edward W. Said menerbitkan gagasannya melalui buku *Orientalisme* pada tahun 1978. Topik-topik yang dikaji dalam kajian ini selain *orientalisme* adalah mengenai kelompok subaltern, ras, imperialisme, dan lain-lain yang secara praksis juga menumbuhkan spirit humanisme dalam perjuangan dan pembelaan terhadap (mantan) bangsa-bangsa terjajah serta kaum-kaum terpinggirkan.

Untuk memahami poskolonial, terlebih dahulu kita pahami konsep kolonialisme. Dalam *Oxford English Dictionary (OED)*, kolonialisme berasal dari bahasa Latin *Colonia* yang berarti pertanian atau pemukiman. Konsepsi ini kemudian diartikan sebagai penaklukan tanah penduduk asli oleh penduduk pendatang.¹⁶ Dalam penaklukan ini terjadi relasi berupa praktek-praktek dominasi dan pemosisian identitas penduduk jajahan sebagai objek baik dalam kesadaran maupun gagasan. Hal inilah yang menjadikan penduduk jajahan selalu menempati posisi subordinat dalam sebuah relasi oposisi biner penjajah (Barat) dan terjajah (Timur). Subordinasi ini sendiri terjadi tidak hanya dalam aspek politik, ekonomi, dan militer, melainkan juga gagasan, wacana, dan ideologi.

¹⁶ Codino Sianipar, *Mendefinisikan Poskolonialisme*, dalam Muzli Sutrisno & Hendar Putranta

Kekuasaan politik kolonial menjadikan jejak-jejak kolonialisme menjelma sebagai warisan yang harus ditanggung oleh negeri yang dijajah setelah negeri itu merdeka dan menjadi negara sendiri. Seperti ditulis Loomba:

Negara bangsa yang baru merdeka hanya membagikan buah secara selektif dan timpang kepada rakyat. Digulingkannya pemerintahan kolonial tidak secara otomatis membawa perubahan ke arah perbaikan status perempuan, kelas pekerja, atau petani di kebanyakan daerah jajahan.¹⁷

Poskolonialisme merupakan kajian yang merujuk pada semacam penegasan terhadap simptom (gejala-gejala) kekuasaan dalam ruang epistemologi dan pedagogi yang berwajah kolonial.¹⁸ Bentuk kekuasaan ini tampak dalam kondisi hegemoni dan dominasi suatu identitas baik itu ras maupun peradaban yang menghasilkan dikotomi dan dikte citra diri terhadap yang lain (*other*). Dalam hubungan kekuasaan kolonial tentang pengetahuan dan peradaban pihak lain, Loomba mengatakan bahwa kolonialisme membiaskan produksi dan membangun kondisi-kondisi bagi penyebaran dan penerimaannya. Proses-proses yang dipakainya untuk melakukan hal itu mengakui terjadinya kekuasaan kolonial dan interaksi-interaksi kompleksnya dengan epistemologi, ideologi, dan cara melihat *yang lain*.

Cara melihat *yang lain* dipengaruhi oleh adanya oposisi biner dimana hal ini mengartikan tanda-tanda berdasarkan penanda lainnya

¹⁷ Loomba, Ania, *Colonialism/ PostColonialism*, London: Routledge, 1998, hal: 12

¹⁸ Shaumul hadi, *Third Debate dan kritik positifisme Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta:

seperti laki-laki >< perempuan, hitam >< putih, rasional >< irasional, dan penjajah >< terjajah. Logika penjajah menempatkan posisi penduduk jajahan dalam posisi *yang lain* tersebut sehingga mereka juga memperlakukannya tidak sebagaimana adanya (objektif) melainkan sebagaimana seharusnya (subjektif). Bagaimana seharusnya penduduk jajahan terlihat dari beban historis negara atau bangsa baru saat penguasaan politik kolonial berakhir, dimana sistem pemerintahan, formasi sosial, bahasa, dan bahkan persepsi pemerintah baru berasal dalam memandang rakyatnya, dilakukan dengan cara pandang penjajah terhadap penduduk jajahan.

Robert J.C. Young mencoba memberikan pemahaman baru terhadap konsep kolonialisme tidak hanya sebagai penguasaan barat terhadap timur, melainkan bersifat lintas ruang dan waktu.¹⁹ Kondisi-kondisi jejak etnik dan cultural *pre-given* kolonialisme inilah yang berpengaruh besar dalam membentuk identitas negara baru tersebut ketika negara tersebut merdeka (identitas poskolonial). Dampak psikologis, ekonomis, dan politis yang menjadi warisan kolonial ini sendiri berbeda dan memiliki kekhasan masing-masing di setiap negara bekas jajahan. Hal ini dipengaruhi oleh strategi kolonial yang dijalankan serta relasi yang terbentuk antara kedua negara.

Gayatri Sivak, seorang pemikir poskolonial, feminisme, dan kritik sastra, dalam esainya *Can Subaltern Speak* berhasil membongkar dan

menemukan warisan kolonial ini dalam kaum perempuan di India. Dalam pembacaannya, kaum perempuan India tidak hanya ditampilkan sebagai kaum terpinggirkan paska era kolonialisme, tapi juga mengenai kegagalan nasionalisme elit dalam mentransformasikan dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi kaum perempuan subaltern, petani, dan komunitas kesukuan. Spivak berhasil membongkar sejarah dengan jelas dengan membedakan antara sejarah dan perjuangan nasionalis elit dengan kaum subaltern.

Dalam kasus perempuan India, pembongkaran (*deconstruction*) ini berhasil dilakukan setelah Spivak mengembangkan strategi etis untuk membaca kehadiran tersembunyi perempuan subaltern dalam arsip imperialisme dan pemberontakan anti kolonial. Dengan memusatkan perhatian secara spesifik terhadap debat seputar *sati* atau pengorbanan diri janda yang berlangsung antara pegawai *East Indian Company*, pendeta Brahma, borjuis India maskulin, dan misionaris Inggris, praktek pembungkaman perempuan subaltern berhasil dilacakinya.

Praktek *sati* ini dipahami Spivak sebagai bentuk subjektifikasi perempuan dengan aturan-aturan legal pemerintah kolonial yang antara lain dilakukan dengan modifikasi kitab *Weda* antara pemerintah kolonial dengan kaum Brahmana. Di sini terjadi kodifikasi tindak pengabdian dari kemauan religious.²⁰ Pengabdian perempuan yang ingin mengabdikan terhadap suaminya yang telah meninggal

²⁰ Mani, *Contentious Traditions*, hal 196 dalam Morthon, Stephen, *Gayatri Spivak: Etika, Subaltern,*

dikodifikasikan secara subjektif. Hal ini, menurut Spivak dengan mengacu pada Lyotard, merupakan bentuk penempatan perempuan India pada lokasi *differend* dimana lokasi tersebut menyimbolkan ketidakmungkinan untuk diakses dari, atau ketidakmungkinan untuk diterjemahkan dari, satu jenis wacana dalam perdebatannya dengan yang lain.²¹ Posisi ini oleh Spivak sendiri disebut sebagai subaltern. Predikat subaltern ini juga melekat pada pekerja Migran Malaysia sebagai ekses dari fragmentasi identitas warisan kolonial.

Sebagai sebuah negara bekas jajahan, Malaysia tidak terlepas dari keberadaan jejak etnik dan cultural *pre-given* kolonialisme. Sistem politik kolonial Inggris yang menempatkan negara ini sebagai *Crown Colony* menjadikan penguatan fragmentasi kelompok sosial. Etnis Melayu sebagai kelompok sosial pribumi mempunyai posisi yang lebih tinggi yang didukung keberadaan kesultanan-kesultanan Melayu yang menjadi entitas politik lokal. Hal ini menjadikan kehadiran etnis China dan India sebagai kelompok identitas dianggap sebagai *yang lain*.

Pemosisian ini berlanjut selama proses kemerdekaan Malaysia. Posisi identitas Melayu yang lebih kuat secara politik membuat pembentukan dan perumusan negara menjadi domain mereka. Perumusan kontrak sosial dalam konstitusi yang salah satu tujuan awalnya menghilangkan friksi antar identitas yang ada, malah lebih

²¹ Spivak, Gayatri, *Can the Subaltern Speak*, (diunduh pada 11 Juli 2012); diakses dari

mengakomodasi etnis Melayu. *Nation building* yang timpang ini akhirnya menjadikan nasionalisme Malaysia sebagai *ethnic nationalism*, nasionalisme yang berdasarkan pada identitas etnis tertentu.

Ketika fragmentasi ini mulai terpolar secara vertikal dengan kekuasaan identitas etnis Melayu sebagai penguasa politik dan identitas etnis yang lain sebagai penguasa ekonomi, kehadiran identitas pekerja migran menjelma menjadi identitas subaltern yang tak terepresentasikan. Hal ini dibuktikan dengan praktek eksploitasi yang mereka alami yang berakar dari ketiadaan payung perlindungan yang memadai dari pemerintah.

2. Konsep Identitas

Dalam kajian hubungan internasional kontemporer, persoalan identitas mempunyai posisi penting dalam menentukan kepentingan dan tindakan suatu aktor. Secara harfiah identitas adalah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada sesuatu atau seseorang yang membedakan dengan orang lain. Apa saja baik fisik maupun non fisik, biasa dijadikan identitas sepanjang ia biasa menjelaskan sesuatu, seseorang, kelompok, maupun bangsa. Identitas biasa dinyatakan secara sadar oleh seseorang ataupun kelompok untuk menjelaskan dirinya atau diungkapkan oleh orang atau kelompok lainnya. Identitas sendiri dibentuk setelah adanya proses identifikasi dan kategorisasi

Sebuah argumen yang dikenal dengan antiesensialisme, menyatakan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang eksis, ia tidak memiliki kualitas universal atau esensial. Ia merupakan hasil konstruksi diskursif, produk diskursus atau cara bertutur yang terarah tentang dunia ini. Dengan kata lain, identitas dibentuk, diciptakan ketimbang ditemukan, oleh representasi, terutama oleh bahasa.²² Hal ini sesuai dengan pemikiran Freud mengenai subjektivitas dimana agensi manusia tidak lagi otonom karena lebih ditentukan oleh suatu ketidaksadaran *id* dan *super ego*. Psikoanalisis, yang merupakan *magnum opus* dari Freud, membuka pemahaman baru mengenai kehidupan manusia dan memiliki dampak yang sangat kuat dalam perspektif ilmu sosial termasuk kajian hubungan internasional. Dalam psikoanalisis, manusia tidak memiliki *pusat esensi*. Yang dilakukan subjek adalah membayangkan secara keliru tentang *ego* nya, yang sebenarnya merupakan bentukan-bentukan ideologi dalam mana ia mengenali identitas dirinya. Struktur pandangan yang keliru inilah yang terkait erat dengan ideologi.²³ Dalam penelitian skripsi ini, ada dua level analisis konsep identitas yang digunakan yaitu sebagai basis ide yang menentukan kepentingan dan sebagai ciri yang membedakan antar kelompok etnis dan sosial yang ada di Malaysia.

²² Barker, Chris, *Cultural Studies*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009, hal: 12

²³ Louis Althusser, *Lenin and Philosophy and Other Essays*, translated by B. Brewster, New

Dalam artikelnya *Anarchy is What States make of it: the social construction of power politics*, Alexander Wendt mengemukakan bahwa identitas adalah basis penting sebagai pembentuk kepentingan.

*Identities are the basis of interests. Actors do not have a "portfolio" of interests that they carry around independent of social context; instead, they define their interests in the process of defening situations.*²⁴

Kepentingan dibalik perlakuan yang cenderung eksploitatif oleh Pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran bukanlah sebuah kepentingan yang ada dengan sendirinya, namun sangat dipengaruhi oleh identitas yang dimilikinya. Penentuan kepentingan di balik tindakan ini didahului oleh pemaknaan baik secara sadar atau tidak sadar terhadap realita yang ada. Dalam proses pemaknaan ini, nilai berperan penting untuk menentukan apa makna yang dicapai dari refleksi tersebut. Hal ini kemudian membentuk identitas aktor yang akhirnya menentukan kepentingan dibalik setiap tindakan aktor tersebut. Poskolonialisme menjelma menjadi identitas di Malaysia. Jejak dan warisan kolonial semakin menguat dengan pelembagaan menjadi kontrak sosial dalam konstitusi Malaysia.

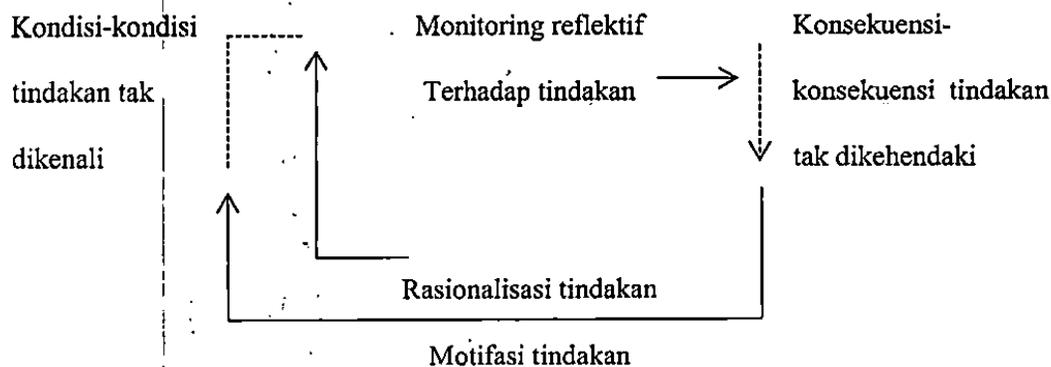
Dalam artikel tersebut, Wendt juga dijelaskan mengenai hubungan antara struktur dan tindakan yang dilakukan oleh agen. Antar keduanya terbentuk hubungan yang saling membutuhkan. Artinya, meskipun identitas sangat menentukan kepentingan aktor tapi tanpa

²⁴ *Anarchy is What States make of it: the social construction of power politics* (diakses pada 22 Oktober 2011) diunduh dari:

http://www.lehman.edu/disciplines/WENDT_anarchy_is_what_states_make_of_it.pdf

keberadaan aktor tersebut identitas juga tidak akan ada. Untuk lebih dalam memahami mengenai relasi antara agen dan struktur, kita bisa merujuk pada Anthony Giddens. Ia membedakan antara monitoring refleksif dan motivasinya. Menurut Giddens, model stratifikasi agen digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Model Stratifikasi Agen



Sumber: Giddens, Anthony, Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat (terj), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal: 8

Monitoring refleksif atas tindakan merupakan satu unsur tetap dari tindakan sehari-hari dan melibatkan tidak hanya perilaku si individu, namun juga perilaku dari individu-individu lain. Aktor tersebut tanpa perdebatan mempertahankan suatu pemahaman teoritis yang terus menerus tentang landasan aktivitas mereka (rasionalisasi tindakan). Sementara motivasi mengacu pada keinginan yang mendorongnya. Motif memberikan keseluruhan rencana atau program yang melatari sederet perilaku dan sebagian besar tidak didasarkan pada motivasi langsung (motif tidak sadar/ kognisi). Keberlangsungan hidup sehari-

... (Giddens, 1984: 10) mengalir sebagai arus tindakan

disengaja. Namun demikian, tindak-tanduk memiliki konsekuensi yang tidak disengaja (*unintended consequences*) yang bisa secara sistematis memberi umpan balik untuk menjadi konsekuensi tidak terkenali dari tindak-tanduk selanjutnya.²⁵ Sementara itu, struktur merujuk pada kelengkapan penstrukturan yang memungkinkan pengikatan ruang waktu dalam sistem-sistem sosial. Kelengkapan ini memungkinkan keberadaan praktek-praktek sosial serupa dalam ruang waktu yang beragam sekaligus memberikan praktek sosial itu sebagai suatu bentuk sistemik.²⁶

Pelembagaan identitas poskolonial dalam sistem politik menguatkannya sebagai *base struktur* kepentingan yang menjadi kesadaran bersama masyarakat di Malaysia. Struktur ini secara terus menerus terlibat dalam reproduksi sosial yang menghasilkan fragmentasi identitas etnis yang menjadikan praktek sosial kontestasi identitas terjadi.

Pelembagaan dalam sistem politik membuat praktek tersebut berjalan stabil sepanjang ruang dan waktu. Politik etnis yang berlaku membuat kompetisi dan perasaan identitas yang terfragmen semakin nyata dan berjalan terus meskipun terjadi pergantian kekuasaan. Keberadaan partai-partai politik etnis yang ada merupakan bentuk nyata dari kontestasi ini. Pelembagaan identitas poskolonial ini

terbukti, meskipun Malaysia mengalami pergantian kekuasaan tetapi kebijakan etnis yang dijalankannya tidak berbeda.

*The Fact that all four Prime Minister have been Malays led to an unwritten accepted norm that the Malaysian leadership of the nation is biased towards the Malays Community.*²⁷

Pelembagaan ini sekaligus menguatkan pemahaman bersama tentang fragmentasi identitas etnis. Identitas poskolonial ini dalam kerangka teoritik Gidden menjadi kondisi-kondisi tindakan yang tidak dikenali. Kompetisi etnis dalam sistem politik menjadi monitoring reflektif, sehingga fragmentasi semakin menguat. Masyarakat termasuk elit politik semakin menyadari adanya perbedaan identitas yang berimplikasi pada tindakan-tindakan sosial dan politik yang bias terhadap identitas tertentu.

Kembali ke pemikiran Wendt dalam bukunya *Social Theory of International Politics*, terdapat dua cara dalam pembentukan identitas ini. Penjelasan pembentukan ini menggunakan meta-evolusi:

- *Natural Selection*

Penjelasan seleksi alam sering digunakan dalam memahami evolusi negara yang secara tradisional dipahami sebagai *survival of the fittest*. Pembentukan identitas dengan cara ini, identitas yang lemah akan kalah bersaing dengan identitas baru yang lebih kuat.

²⁷ *Malaysia. The making of nation* (diakses pada 1 November 2011); diunduh dari:

- *Cultural Selection*

Cultural Selection menjelaskan mengenai penularan faktor determinan perilaku dari individu satu ke individu yang lain dan dari generasi ke generasi selanjutnya yakni melalui *imitation* dan *social learning*. Dalam proses imitasi, identitas dan kepentingan akan terwujud jika aktor tersebut telah memiliki persepsi mengenai apa dipersepsikan sebagai sebuah keberhasilan (*successful*). Imitasi seperti itu cenderung akan membuat populasi lebih homogen. Proses selanjutnya adalah *social learning*. Dalam proses ini:

*The basic idea is that identities and their corresponding interests are learned and then reinforced in response to how actors are treated significant others.*²⁸

Sebagai sebuah base struktur penentu kepentingan sebuah negara, identitas poskolonial sebenarnya bersaing dengan identitas-identitas lain termasuk wacana *Unity in Diversity* dan *One Malaysia* yang dicetuskan sebagai semboyan dan *way of life* negara tersebut. Namun, pelebagaan dalam sistem politik membuat keinginan untuk melindungi keberlangsungan etnis Melayu sebagai identitas tunggal dan pemilik yang sah negara-Malaysia membuat identitas Poskolonial masih kuat berkelindan dalam kehidupan sosial dan politik Malaysia.

3. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan salah satu paradigma dalam hubungan internasional yang memandang bahwa dunia sosial termasuk hubungan internasional merupakan suatu konstruksi manusia. Seperti pandangan teori kritis dan postmodern, paradigma ini menolak adanya suatu kenyataan obyektif. Secara ontologis, konstruktivisme dibangun oleh tiga proposisi utama yaitu *pertama*, struktur sebagai pembentuk perilaku aktor sosial dan politik, baik individual maupun negara, tidak hanya terdiri memiliki aspek material, tetapi juga normatif dan ideasional. *Kedua*, kepentingan (sebagai dasar bagi tindakan atau perilaku politik) bukan menggambarkan rangkaian preferensi yang baku, yang telah dimiliki oleh aktor-aktor politik, melainkan sebagai produk dari identitas aktor-aktor tersebut. *Ketiga* struktur dan agen saling menentukan satu sama lain.

Konstruktivis pada dasarnya adalah strukturasionis yakni menekankan peran struktur non-material terhadap identitas dan kepentingan serta, pada saat yang bersamaan, menekankan peran praktek dalam membentuk struktur-struktur tersebut. Artinya, meskipun sangat menentukan identitas (dan oleh karenanya juga kepentingan) aktor-aktor politik, struktur ideasional atau normatif tidak akan muncul tanpa adanya tindakan-tindakan aktor-aktor politik.

Norma-norma sosial dan legal yang terlembagakan dalam

...berkontribusi pada konstruksi identitas dan berimplikasi pada

pengambilan kebijakan yang diambil elite pemerintah termasuk terhadap pekerja migran. Norma-norma sosial dan legal mengalami institusionalisasi dalam sistem politik Malaysia. Lingkup domestik cenderung memiliki derajat agensi yang tinggi dan otonom terhadap pengaruh sistem dan struktur internasional, dimana struktur normatif dan kebijakan negara terikat satu sama lain dan saling mempengaruhi.

Identitas poskolonial menjelma sebagai *state identity* Malaysia. Fragmentasi sosial dan politik etnis yang berkembang diposisikan sebagai *state-society relations*. *State-transnational relations* tidak terlalu memiliki pengaruh, hal ini terbukti dari beberapa kerangka hukum perlindungan internasional terhadap pekerja migran dan perlindungan HAM tidak diimplementasikan dalam kerangka hukum nasional. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah ketertutupan pers sehingga wacana-wacana seperti kemanusiaan, keadilan terhadap pekerja migran, dan perlindungan HAM tidak bisa menjadi diskursus dominan di dalam negeri Malaysia. Pelaksanaan sistem politik etnis menjadikan agensi kelembagaan pemerintah terhadap keberadaan identitas ini cenderung tinggi, nilai dan norma poskolonial berupa fragmentasi identitas akhirnya menjelma sebagai identitas negara yang

D. Hipotesa

Hipotesa dari penelitian skripsi ini adalah:

1. *Pemerintah Malaysia bersikap dan mengambil kebijakan yang cenderung eksploitatif terhadap para pekerja migran karena keberadaan identitas poskolonial yang berkelindan dalam kehidupan sosial dan politik Malaysia.*
2. *Keberadaan identitas poskolonial ini, yang berupa fragmentasi dan persaingan identitas kelompok etnis, menjadikan etnis Melayu yang menjadi status quo penguasa menganggap identitas kelompok lain termasuk pekerja Migran sebagai ancaman (existensial threat) bagi keberadaan mereka.*
3. *Pemerintah Malaysia (baca: etnis Melayu) berupaya mengamankan (sekuritisasi) identitas Melayu dari ancaman kelompok identitas lain, termasuk pekerja migran, dengan membuat kebijakan-kebijakan yang cenderung eksploitatif terhadap mereka.*

E. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pembentukan identitas poskolonialisme, fragmentasi sosial masyarakat, dan sekuritisasi etnis yang menyebabkan Pemerintah Malaysia bersikap dan memiliki kecenderungan mengambil kebijakan yang eksploitatif terhadap

F. Tujuan Penelitian

1. Memahami alasan dibalik sikap dan kebijakan pemerintah Malaysia yang cenderung eksploitatif terhadap pekerja migran.
2. Mendiskripsikan keadaan pekerja migran di Malaysia serta bentuk tindakan eksploitatif yang dialaminya.
3. Mendeskripsikan pembentukan identitas poskolonial sebagai *base struktur* yang berperan sebagai faktor pembentuk kepentingan kebijakan Malaysia terhadap pekerja migran serta sekuritisasi sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh *securitizing actor* etnis Melayu untuk mengamankan identitas mereka.

G. Metode Penelitian

1. Metode Analisis

Skripsi ini akan menggunakan model analisa deskriptif dan analisis untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada. Model analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu masalah yang diteliti dalam suatu situasi untuk kemudian dianalisis mengapa masalah tersebut terjadi.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan dapat dipercaya skripsi ini akan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh berupa data

yang diperoleh dari beberapa jurnal, koran, situs internet, dan

sumber-sumber lain yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

H. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II. Identitas Poskolonial Malaysia

Bab II akan menjelaskan variabel independen dalam penelitian ini berupa identitas poskolonial sebagai identitas yang ada di Malaysia. Rincian pembahasannya antara lain sejarah kolonial Inggris dan penjajahan Malaysia, pemosisian negara terjajah (*colonized state*) sebagai subjek kolonial, kemerdekaan dan pembentukan kebangsaan (*nation building*) Malaysia, dan pembentukan identitas poskolonial Malaysia.

3. Bab III. Pekerja Migran sebagai Kelompok Subaltern

Bab III akan membahas variabel dependen yaitu kebijakan yang cenderung diskriminatif dari Pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran. Poin-poin yang dibahas antara lain sejarah pekerja

kebijakan yang cenderung diskriminatif terhadap pekerja migran, dan pemposisian pekerja migran sebagai kelompok subaltern.

4. Bab IV. Pelembagaan Identitas Poskolonial, Sekuritisasi Etnis Melayu, dan Pekerja Migran Sebagai Ancaman Identitas

Bab IV akan membahas hubungan antar kedua variabel yang telah dibahas dalam bab sebelumnya yakni pelembagaan identitas poskolonialisme dalam sistem pemerintahan Malaysia. Poin-poin nya antara lain pelembagaan identitas poskolonial dalam formasi sosial-politik Malaysia, politik etnis dan kegagalan demokrasi konsosiasional Malaysia, hegemoni dan kekuatan agensi politik UMNO, serta serta sekuritisasi etnis Melayu dan pekerja migran sebagai ancaman identitas.

5. Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab V akan mengelaborasi pembahasan-pembahasan yang ada dalam penelitian ini sehingga dapat diambil kesimpulan apakah hipotesa dapat menjawab pokok permasalahan atau tidak